

ASPIRASI SISWA SMU DAN ORANGTUANYA PADA PENDIDIKAN DAN PEKERJAAN KAITANNYA DENGAN RENCANA SISWA UNTUK MELANJUTKAN PENDIDIKAN KE PERGURUAN TINGGI *(Pandangan Fungsionalisme pada Aspirasi Pendidikan dan Pekerjaan dari Para Siswa SMU beserta Orangtuanya)*

Tuti Budirahayu

Latar Belakang Masalah

Upaya membangun perekonomian suatu negara, membawa pengaruh yang sangat besar dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat. Dalam rangka membangun sistem perekonomian inilah, maka anggota-anggota masyarakat diprasyarkan untuk menguasai ilmu penge-tahuan dan teknologi, dengan tujuan agar mereka dapat ditempatkan di berbagai posisi pekerjaan sehingga roda perekonomian dapat terus bergerak.

Institusi perekonomian yang kemudian berkembang semakin dinamis, pada akhirnya akan bersinergi dengan institusi-institusi lainnya sehingga dapat mengantisipasi dan menyesuaikan diri dengan perubahan-perubahan yang semakin cepat, utamanya di sektor perdagangan dan perekonomian dunia. Misalnya, lembaga politik dan hukum, mereka harus memiliki perangkat aturan dan perundang-undangan yang dapat mengantisipasi praktek-praktek kapitalisasi yang apabila tidak dibentengi sedemikian rupa akan merusak tata nilai kehidupan masyarakat. Dengan situasi seperti itu juga, maka dibutuhkan anggota-anggota masyarakat yang memiliki pengetahuan, keahlian dan keterampilan di berbagai bidang, seperti: manajerial, administrasi, ketatanegaraan, politik dan sebagainya. Dengan kondisi tersebut, jadilah lembaga pendidikan berfungsi untuk

“mencetak” anggota-anggota masyarakat, sehingga kelak mereka dapat menguasai berbagai keahlian dan keterampilan yang dibutuhkan untuk mengembangkan negara dan bangsanya.

Terjalannya proses sistem sosial semacam itu, menyebabkan anggota-anggota masyarakat memiliki persepsi atau anggapan tertentu terhadap lembaga pendidikan, yaitu: “sekolah (sebagai lembaga pendidikan) adalah tempat untuk mempersiapkan anggota-anggota masyarakat agar dapat ditempatkan pada posisi-posisi tertentu di berbagai struktur kelembagaan yang ada”. Akibatnya, cukup banyak anggota masyarakat yang berkeinginan untuk memperoleh pendidikan agar lebih mudah mendapatkan pekerjaan. Jika pekerjaan telah diperoleh, keuntungan selanjutnya adalah mereka akan memperoleh penghasilan untuk meningkatkan taraf hidup. Sehingga masyarakat berprinsip: “jika ingin memperoleh penghasilan yang semakin tinggi maka bersekolahlah setinggi-tingginya”.

Kebijaksanaan pembangunan di Indonesia nampaknya sejalan dengan alur pemikiran seperti di atas dan secara tidak langsung juga mempengaruhi terbentuknya persepsi di antara para anggota masyarakat Indonesia akan arti dan fungsi pendidikan. Sebagai bukti, melalui Pelita I (tahun 1969/70 sampai 1973/74), kemudian nyata lagi pada Pelita II dan Pelita-Pelita

selanjutnya, kebijaksanaan pemerintah Indonesia ditekankan pada pembangunan bidang ekonomi, sedangkan pembangunan di bidang-bidang lainnya sebagai penunjang, didorong sesuai dengan kemampuan dan sumber daya yang diperoleh dari pembangunan bidang ekonomi tersebut. Dalam bidang sosial misalnya, kebijaksanaan itu mengandung arti akan tumbuhnya usaha-usaha untuk mencukupi kebutuhan dasar manusia. Dalam rangka kebijaksanaan ekonomi dan sosial inilah bidang pendidikan memperoleh prioritas yang cukup tinggi, sehingga pada akhir Pelita III, pemerataan pendidikan dalam bentuk pendidikan universal sekolah dasar telah dicapai (Tilaar, 1995:129).

Jalinan antara kebijaksanaan pendidikan dan pembangunan di bidang ekonomi terus menerus diperhatikan, terutama sejak pembangunan Jangka Panjang Tahap I. Berbagai kebijaksanaan pendidikan yang diarahkan untuk meningkatkan kemampuan sumber daya manusia telah banyak dihasilkan, misalnya (Biro Pusat Statistik, 1997:39):

- (1) Program Pemberantasan Buta Huruf;
- (2) Program Inpres SD sejak tahun anggaran 1973/1974;
- (3) Program Wajib Belajar 6 Tahun yang dilaksanakan sejak tahun 1984 dan yang relatif baru dijalankan adalah Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun yang dicanangkan pada tahun 1994.

Program-program tersebut kelihatannya menunjukkan hasil yang positif, terutama untuk kepentingan pembangunan perekonomian nasional. Bukti-bukti yang terkumpul menunjukkan, bahwa tingkat pendidikan penduduk Indonesia yang masuk ke dalam angkatan kerja, dari tahun ke tahun terus meningkat. Data Sensus Penduduk dari tahun 1980 sampai tahun 1994 tentang Struktur Angkatan Kerja Menurut

Pendidikan menunjukkan, bahwa angkatan kerja di Indonesia yang berpendidikan mulai dari tamat SD sampai tamat Universitas, dari tahun ke tahun jumlahnya terus bertambah. Jumlah angkatan kerja yang tidak tamat SD, sejak tahun 1980 sampai tahun 1994, menurun dengan cukup tajam (Suryadi dan Salim, 1995). Bukti lain yang bisa diketengahkan adalah meningkatnya Angka Partisipasi Sekolah. Penduduk yang bersekolah pada kurun waktu 1990 sampai 1997, jumlahnya terus meningkat dan terjadi pada semua kelompok usia sekolah. Sebagai contoh, berdasarkan Susenas 1990 sampai 1997 tentang Angka Partisipasi Sekolah di Pedesaan dan Perkotaan, menunjukkan bahwa Angka Partisipasi Sekolah di tingkat SD (penduduk usia 7 hingga 12 tahun) jumlahnya di atas 90% (BPS, 1997: 41).

Meningkatnya jumlah penduduk Indonesia yang berpendidikan dan kemudian masuk ke dalam angkatan kerja serta meningkatnya Angka Partisipasi Sekolah, mungkin disebabkan oleh suksesnya program pemerataan pendidikan, tetapi mungkin juga karena terbentuknya persepsi masyarakat akan fungsi pendidikan. Artinya, dengan gencarnya pemerintah mendorong penduduknya untuk bersekolah, secara tidak langsung juga meningkatkan kesadaran para orangtua untuk menyekolahkan anak-anaknya hingga ke jenjang pendidikan menengah dan tinggi, terutama di perkotaan. Kesadaran tersebut dilatarbelakangi oleh tujuan, agar kelak anak-anak mereka dapat bekerja dan meningkatkan taraf kehidupan yang lebih baik untuk masa yang akan datang.

Fenomena tentang meningkatnya Angka Partisipasi Sekolah dan meningkatnya jumlah penduduk yang ingin terus melanjutkan sekolah, ternyata menimbulkan dilema. Di satu sisi negara memiliki aset sumber daya manusia yang siap menggerakkan roda perekonomian, tetapi di sisi

yang lain, lapangan kerja yang tersedia mungkin tidak mampu menyerap seluruh lulusan, sehingga akan mengakibatkan ketidakseimbangan mekanisme permintaan dan penawaran tenaga kerja. Untuk mengantisipasi hal tersebut, nampaknya sudah pernah ada usaha pemerintah untuk mengaitkan kebijaksanaan-kebijaksanaan pendidikan dengan dunia kerja (yang telah dirintis sejak Pelita I).

Namun sayang, dalam pelaksanaannya mengalami berbagai hambatan, antara lain ternyata di setiap sektor, baik pendidikan maupun dunia kerja masing-masing berjalan sendiri. Sebagai akibatnya terjadilah ketidakserasian antara keluaran (*output*) sistem pendidikan dan kebutuhan akan tenaga kerja (Tilaar, 1995:197). Hal tersebut terjadi, mungkin karena lembaga pendidikan terus menerus didirikan.

Pendirian sekolah-sekolah, sebagian karena kebijaksanaan tentang pemerataan pendidikan, sebagian juga karena tuntutan masyarakat untuk memperoleh pendidikan formal di berbagai jenjang. Tetapi, mungkin juga hal itu disebabkan oleh semangat untuk membangun gedung-gedung sekolah karena adanya proyek-proyek pembangunan fisik yang dananya berasal dari pinjaman atau bantuan luar negeri.

Fenomena lain yang menarik adalah, bahwa pendirian sekolah-sekolah di kota, terutama di tingkat Sekolah Menengah Umum, Akademi dan Perguruan Tinggi, nampaknya lebih ditujukan untuk memenuhi keinginan masyarakat untuk memperoleh pendidikan yang semakin tinggi, tanpa menghiraukan kesesuaiannya dengan lapangan kerja yang tersedia. Banyak SMU, SMK serta Perguruan Tinggi didirikan, terutama yang diselenggarakan oleh swasta, menawarkan program studi atau jurusan yang ternyata kurang memiliki relevansi dengan dunia kerja (Rachbini, 1997). Mungkin juga pendirian sekolah

hanya sekedar ingin mengeruk keuntungan dari bisnis pendidikan, mengingat banyak anggota masyarakat yang bersedia membayar mahal demi cita-cita untuk memperoleh pendidikan atau bahkan gelar yang dapat diraih dengan tanpa susah payah.

Keadaan seperti itu terus berlanjut, sehingga jumlah pengangguran tenaga kerja terdidik dari tahun ke tahun terus meningkat, terutama di kalangan tamatan SMU. Kenaikan angka pengangguran di tingkat SMU tersebut hampir 54%, yang dihitung dari tahun 1989 hingga tahun 1995 (data Sakernas BPS 1989 dan Supas BPS 1995, tentang Tingkat Pengangguran Terbuka Berdasarkan Tingkat Pendidikan).

Hal tersebut akan menjadi beban dan menimbulkan persoalan-persoalan yang cukup rumit bagi negara dan bangsa Indonesia. Penjelasan yang diajukan mungkin dapat dilihat dari sisi makro dan mikro. Secara makro, fenomena itu muncul karena tidak ada kesesuaian antara kebijaksanaan pendidikan, terutama di tingkat pendidikan menengah dan tinggi dengan kebijaksanaan ketenagakerjaan. Secara mikro, karena adanya persepsi dan sikap masyarakat yang menganggap lembaga pendidikan, memiliki fungsi, salah satunya, sebagai sarana meniti tangga untuk meraih simbol status sosial tertentu.

Penelitian yang dilakukan ini, lebih menyoroti fenomena yang bersifat mikro. Beberapa bukti yang dapat digunakan untuk mendukung penjelasan tersebut adalah:

- (1) Adanya aspirasi dari sebagian anggota masyarakat untuk memperoleh pendidikan yang setinggi-tingginya. data Statistik Pendidikan Susenas 1992 dari BPS menunjukkan, bahwa sebagian besar penduduk usia sekolah, lebih banyak yang ingin terus bersekolah hingga jenjang pendidikan tertentu dan tidak ingin bekerja dulu sebelum sampai jenjang pendidikan tersebut (umumnya

- sampai pada jenjang Diploma atau Akademi dan Universitas);
- (2) Terdapat beberapa jenis pekerjaan dengan status tertentu (manajerial ke atas) yang cenderung diduduki orang-orang dengan kualifikasi pendidikan tinggi; hal ini didukung pula oleh banyaknya orang yang ingin bekerja dan menempati posisi pekerjaan tersebut (Suryadi dan Salim, 1995:73);
 - (3) Adanya keinginan dari sebagian besar penduduk usia sekolah yang sedang duduk di bangku SMU ke atas untuk bekerja sebagai pegawai negeri atau pegawai swasta (Statistik Pendidikan, Susenas 1992, BPS), dan
 - (4) Penelitian yang pernah dilakukan oleh harian *Kompas* di delapan kota besar di Indonesia pada tahun 1997 menunjukkan, siswa-siswa SMU ingin menjadi sarjana agar dapat lebih diakui di dunia kerja (litbang *Kompas*, 1997).

Dengan adanya bukti-bukti seperti di atas, maka diduga, bahwa aspirasi dan selera masyarakat, khususnya di kota, mungkin menjadi tidak sejalan dengan lapangan kerja dan struktur pekerjaan yang tersedia. Aspirasi masyarakat akan pendidikan adalah ingin mencapai tingkat pendidikan yang setinggi-tingginya agar lebih mudah memperoleh pekerjaan. Di samping itu, sekolah hingga jenjang pendidikan tinggi (Perguruan Tinggi) adalah sebagai salah satu upaya untuk meniti tangga mobilitas sosial

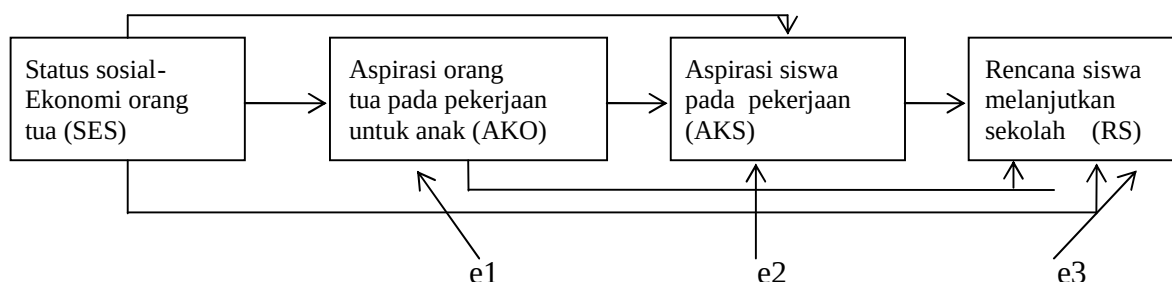
atau sebagai alat eskalasi sosial. Perguruan Tinggi akhirnya menjadi salah satu tumpuan harapan dari sebagian siswa SMU atau SMK dan orangtuanya untuk memperoleh dua hal di atas. Sehingga tidak heran apabila minat siswa lulusan SMU dan SMK untuk masuk ke Perguruan Tinggi, dari tahun ke tahun terus meningkat.

Penelitian ini bertujuan mendapatkan gambaran faktor-faktor penyebab tingginya minat siswa SMU melanjutkan pendidikan ke Perguruan Tinggi. Adapun faktor-faktor yang diduga berpengaruh terhadap rencana siswa SMU untuk melanjutkan pendidikan ke Perguruan Tinggi adalah:

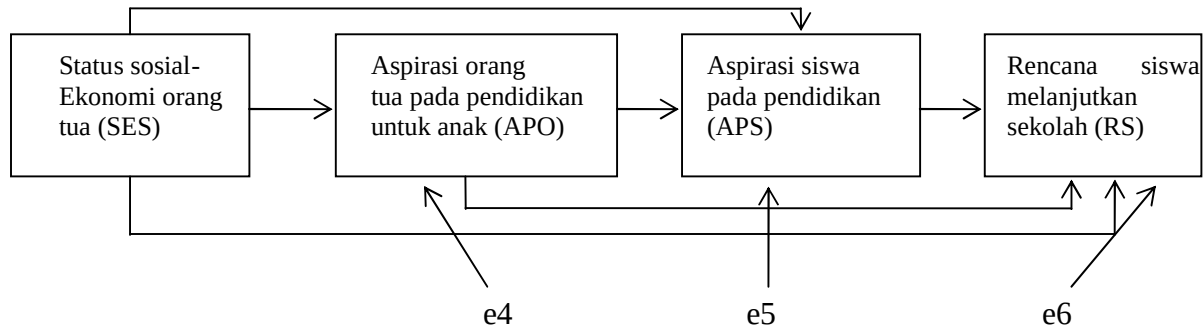
- (1) Tingkat status sosial-ekonomi orangtua (disingkat SES);
- (2) Aspirasi orangtua pada pendidikan untuk anaknya (APO);
- (3) Aspirasi orangtua pada pekerjaan untuk anaknya (AKO);
- (4) Aspirasi siswa pada pendidikan untuk dirinya (APS) dan
- (5) Aspirasi siswa pada pekerjaan untuk dirinya (AKS).

Di samping itu, penelitian ini juga menguji dua model analisis yang telah dikonstruksikan untuk menggambarkan kaitan antar hubungan di antara berbagai faktor di atas terhadap terbentuknya rencana siswa untuk melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi. Kedua model analisis tersebut adalah:

Model Analisis I:



Model Analisis II:



Keterangan:

1. Sebagai variabel *eksogenus* adalah: Status Sosial Ekonomi Orangtua (SES)
2. Sebagai variabel *endogenus* adalah: RS, AKO, AKS, APO dan APS
3. *e1 sampai dengan e6*, adalah: unsur-unsur residual yang menunjukkan efek atau pengaruh dari variabel-variabel lain yang tidak termasuk dalam model

Tinjauan Literatur

Kerangka pemikiran yang digunakan dalam penelitian ini diambil dari teori yang dikemukakan oleh Randall Collins (dalam Karabel dan Halsey, 1978:118-133). Sudah menjadi kaidah umum, bahwa pendidikan sangat berperan untuk memperoleh pekerjaan di masyarakat. Oleh karena itu pendidikan kemudian menjadi studi yang menempati posisi penting dalam analisis stratifikasi dan mobilitas sosial. Dua teori yang dibahas oleh Collins untuk memahami hubungan antara pendidikan dan pekerjaan dalam kaitannya dengan stratifikasi dan mobilitas sosial adalah: (1) teori fungsional yang mempunyai perhatian pada upaya masyarakat industri untuk memenuhi persyaratan akan kebutuhan tenaga-tenaga berketerampilan teknis; (2) teori konflik (diturunkan dari pendekatan Max Weber), yang menetapkan beberapa faktor penentu yang berpengaruh terhadap capaian pendidikan dan pekerjaan sebagai akibat dari bermacam-macam perjuangan di berbagai kelompok status. Kedua teori itu digunakan Collins untuk menganalisis

fenomena peranan pendidikan dalam perolehan pekerjaan di masyarakat Amerika modern.

Pendekatan fungsi-teknis pendidikan, memiliki beberapa proposisi dasar, yaitu:

- (1) Persyaratan atau kebutuhan ketrampilan pada beberapa pekerjaan di masyarakat industri secara konstan meningkat karena adanya perubahan teknologi. Dua proses yang terlibat dalam keadaan tersebut adalah:
 - (a) perbandingan pada pekerjaan yang membutuhkan ketrampilan rendah semakin menurun dan perbandingan pada pekerjaan yang membutuhkan ketrampilan tinggi semakin meningkat;
 - (b) Pekerjaan yang sama, kualitasnya semakin ditingkatkan melalui persyaratan pendidikan dan ketrampilan yang harus dimiliki oleh para pekerja;
- (2) Pendidikan formal memberikan pelatihan, baik dalam keterampilan yang khusus atau dalam bentuk kemampuan umum, karena diperlukan untuk jenis-

jenis pekerjaan yang membutuhkan keahlian yang lebih tinggi;

- (3) Oleh karena itu, kebutuhan akan pendidikan untuk pekerjaan akan semakin meningkat, sedangkan jumlah penduduk juga semakin besar, sehingga anggota-anggota masyarakat dituntut untuk menempuh pendidikan lebih panjang dengan waktu yang lebih lama.

Pendekatan konflik dalam stratifikasi pendidikan memandang pendidikan sebagai suatu mekanisme untuk menempatkan tenaga kerja. Mekanisme yang dimaksud adalah bahwa para pemilik perusahaan atau majikan menggunakan pendidikan sebagai alat untuk menyeleksi orang-orang yang telah memperoleh sosialisasi dari kelompok status yang berpengaruh. Hal ini terutama untuk orang-orang yang masuk pada jenjang manajerial, di mana umumnya mereka berbudaya elit. Sedangkan untuk pekerja yang tingkatannya lebih rendah, mereka harus bersikap hormat terhadap budaya yang berpengaruh serta para elit yang mengangkat mereka sebagai pekerja. Berdasarkan anggapan seperti itu, maka pendekatan ini memiliki proposisi:

- (1) Sekolah menyediakan pelatihan untuk budaya elit dan juga mengajarkan bentuk-bentuk penghormatan untuk kelompok yang berbudaya elit tersebut;
- (2) Majikan menggunakan pendidikan sebagai suatu alat seleksi dalam merekrut pegawai-pegawainya dengan berdasarkan pada ciri-ciri budaya tertentu.

Model konflik ini dapat juga digunakan untuk menguji kasus-kasus di mana pendidikan relatif penting atau bahkan mungkin juga jadi tidak penting lagi untuk memperoleh pekerjaan. Kesesuaian antara budaya sekolah dan budaya kerja dapat dianggap sebagai suatu rangkaian kesatuan. Terdapat asumsi, bahwa sekolah-sekolah

yang menghasilkan lulusan yang paling elit akan paling dekat dihubungkan dengan pekerjaan yang elit pula. Sebaliknya, sekolah-sekolah yang sosialisasinya kurang baik atau tidak sesuai dengan budaya elit akan tersisih dari dunia kerja atau mungkin para lulusannya tidak dimasukkan ke tingkat organisasi elit perusahaan.

Kedua pendekatan yang telah diemukakan Collins, masing-masing memiliki dimensi yang berbeda. Perbedaan-perbedaan tersebut dapat dikategorikan sebagai berikut:

1. Pendekatan fungsi-teknis pendidikan menganggap lembaga pendidikan bertujuan melatih anggota-anggota masyarakat dengan ketrampilan atau keahlian tertentu. Maksudnya, adalah agar mereka dapat menempati berbagai posisi pekerjaan yang tersedia. Kebutuhan akan tenaga kerja berkeahlian sudah ditetapkan, sehingga hal itu dapat menjadi penentu dasar tentang siapa dan untuk posisi apa mereka dipilih. Sebaliknya, pendekatan konflik beranggapan, bahwa penentuan tentang siapa-siapa yang akan dipilih dan untuk posisi apa, bukan didasarkan atas kebutuhan akan tenaga kerja yang berkeahlian, tetapi lebih didasarkan atas latar belakang sosial dan kelompoknya. Dengan demikian, orang-orang yang akan menerima calon tenaga kerja memiliki kebebasan untuk memilih siapa yang boleh atau tidak boleh diterima bekerja, kebebasan itu didasarkan pada "selera" majikan yang menyediakan posisi pekerjaan tersebut.
2. Pendekatan fungsi-teknis pendidikan lebih berorientasi kompetisi dan prestasi. Artinya, pendekatan ini tidak membedakan status atau posisi sosial seseorang di dalam pencapaian pendidikan dan pekerjaan. Sebaliknya, pendekatan konflik melihat, bahwa sifat-sifat askriptiflah yang lebih mengedepan untuk mendapatkan pekerjaan.

3. Berdasarkan orientasi tersebut maka pendekatan fungsi-teknik memiliki pola mobilitas sosial yang lebih terbuka dari pada pendekatan konflik. Pendekatan fungsi-teknis beranggapan bahwa bentuk askriptif merupakan tanda dari ketidaksempurnaan mekanisme fungsional dalam menempatkan posisi seseorang. Pendekatan ini berasumsi, bahwa siapapun dan dari latar belakang sosial manapun seseorang berasal, apabila ia mampu, yang diukur melalui penguasaan ketrampilan atau keahlian yang dibutuhkan, maka ia berkesempatan menduduki posisi pekerjaan yang telah tersedia. Pada pendekatan konflik, orang-orang tertentu sajalah, yaitu orang-orang yang berasal dari latar belakang sosial elit atau mengalami sosialisasi dari sekolah-sekolah yang dianggap elit, yang memiliki kemungkinan lebih besar untuk menduduki posisi tinggi dalam pekerjaan.

Guna kepentingan penelitian ini maka kerangka pemikiran yang dipakai adalah teori fungsi-teknis pendidikan. Alasan digunakannya teori tersebut karena:

- (1) Kebijakan pendidikan di Indonesia cenderung dilandasi oleh pemikiran-pemikiran fungsional, di mana secara umum pendidikan difungsikan untuk menggerakkan perekonomian negara. Artinya, lembaga pendidikan berfungsi untuk mempersiapkan tenaga kerja terdidik yang utamanya diarahkan untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja berkeahlian agar dapat menjalankan kegiatan pembangunan yang bertumpu pada pertumbuhan ekonomi;
- (2) Masyarakat Indonesia, cenderung sepaham dengan kebijakan pendidikan di Indonesia, sehingga aspirasinya pada pendidikan mungkin condong juga pada pemikiran-pemikiran fungsional. Gejala atau fenomena yang terbaca adalah,

bahwa sebagian besar masyarakat mempunyai anggapan, bahwa posisi pada pekerjaan-pekerjaan tertentu akan mudah diduduki apabila telah memperoleh bekal pendidikan formal yang cukup;

- (3) Mobilitas sosial di Indonesia, khususnya mobilitas antar dan intra generasi, sifatnya terbuka dan secara umum lebih menekankan prestasi, utamanya prestasi yang diperoleh melalui pendidikan.

Metode Penelitian

Tipe penelitian ini adalah eksplanasi dengan menggunakan pendekatan kuantitatif dan metode yang digunakan adalah survei. Populasi dalam penelitian ini adalah siswa SMU Negeri dan Swasta, yang sedang duduk di kelas 3 untuk semua jurusan (IPA, IPS dan Bahasa) beserta orangtuanya masing-masing. Penelitian ini dilakukan pada akhir tahun 1997, di DKI Jakarta dan Kodya Surabaya.

Sampel ditarik dengan cara berkelompok dan bertahap (*multistage stratified sampling*) dengan didasarkan pada data tentang SMU-SMU se Indonesia yang lulusannya mengikuti Ujian Masuk ke Perguruan Tinggi Negeri (UMPTN) pada tahun 1995 (Pusat Komputer Universitas Indonesia, 1995). SMU-SMU yang tercantum pada data tersebut telah dikelompokkan menjadi empat kategori peringkat berdasarkan nilai rata-rata hasil ujian dari para lulusannya. Tahapan-tahapan pengambilan sampelnya adalah:

- (1) mendaftar ulang SMU-SMU yang tercantum pada data sekunder, khususnya yang berasal dari Jakarta dan Surabaya;
- (2) mengambil sebesar 10% SMU dari masing-masing kelompok dengan teknik penarikan sampel acak sederhana;

(3) mengambil sebesar 10% siswa dari seluruh siswa kelas 3 di masing-masing SMU yang telah diambil sebagai sampel. Setelah ditarik sampel SMU, ternyata ada 11 SMU di DKI Jakarta dengan jumlah siswa kelas 3 sebagai sampel sebesar 294 orang. Sedangkan di Kodya Surabaya diperoleh 7 SMU dengan jumlah siswa kelas 3 yang diambil sebagai sampel sebesar 230 orang.

Data dikumpulkan dengan menggunakan kuesioner terstruktur yang dibagikan kepada para siswa dan orangtuanya. Data dianalisis dengan menggunakan:

- (1) tabel-tabel frekuensi untuk mendeskripsikan variabel penelitian;
- (2) korelasi *product moment* untuk melihat ada atau tidaknya hubungan di antara variabel-variabel penelitian;
- (3) analisis jalur atau *path analysis*, untuk melihat alur dan kekuatan hubungan di antara beberapa variabel bebas terhadap variabel terikat.

Uji ini juga melihat pengaruh langsung maupun tak langsung dari variabel-variabel bebas terhadap variabel terikat. Variabel-variabel bebas dalam penelitian ini adalah:

1. aspirasi siswa pada pendidikan (APS);
2. aspirasi siswa pada pekerjaan (AKS);
3. aspirasi orangtua pada pendidikan selepas SMU untuk anaknya (APO);
4. aspirasi orangtua pada pekerjaan untuk anaknya (AKO), dan
5. tingkat status sosial-ekonomi orangtua (SES). Sedangkan yang disebut sebagai variabel terikat adalah rencana siswa setelah lulus SMU (RS).

Diskusi Hasil Penelitian

Berdasarkan data yang terkumpul dan hasil analisisnya, diketahui bahwa:

1. Rencana siswa setelah lulus SMU (RS) sebagian besar adalah memang ingin melanjutkan pendidikan ke universitas atau institut (75,8%), 7,4% ingin melanjutkan ke Akademi/Politeknik/ Diploma dan 2,9% hanya ingin mengambil kursus-kursus non-formal setelah lulus SMU. Siswa yang ingin langsung bekerja setelah lulus SMU jumlahnya sekitar 5,4%.

Dengan melihat data tersebut, nampak memang sebagian besar siswa SMU cenderung untuk memilih jenjang Strata satu dibandingkan mengambil program diploma/politeknik atau akademi. Apalagi bila dibandingkan dengan mereka yang memilih langsung bekerja atau hanya ingin mengikuti kursus-kursus singkat, jumlahnya jauh lebih kecil daripada yang ingin masuk ke perguruan tinggi.

Fenomena ini menunjukkan, bahwa siswa SMU cenderung memilih jalur pendidikan yang bergelar dari pada jenis pendidikan yang nongelar dan kebanyakan dari mereka beranggapan, bahwa semakin lama mereka menempuh jenjang pendidikan di perguruan tinggi (sekitar 4 sampai 5 tahun) maka akan semakin dihargai ilmu yang mereka miliki di pasar kerja. Ini nampaknya sejalan dengan alur pemikiran fungsi-teknis pendidikan, yang menganggap, bahwa agar anggota masyarakat dapat ditempatkan di dunia kerja yang semakin membutuhkan keahlian dan keterampilan yang tinggi, maka mereka juga harus menempuh pendidikan yang semakin lama dan semakin tinggi.

2. Aspirasi siswa pada pendidikan (APS), khususnya pendidikan setelah SMU, menunjukkan bahwa:
 - (a) dalam rencananya untuk memilih suatu program studi di perguruan tinggi, hampir separoh responden memilih program studi tertentu karena ingin memperoleh keterampilan atau

keahlian tertentu (55,4%) dan%tase terbesar kedua adalah memilih program studi tertentu karena lulusannya akan memperoleh pekerjaan yang bagus (17%);

- (b) dalam rencananya untuk memilih perguruan tinggi, ternyata sebagian besar responden lebih memilih Perguruan Tinggi Negeri (67%) dan program studi yang banyak dipilih para responden adalah Ilmu-Ilmu Ekonomi (24,4%) dan Teknik (22,4%). Alasan responden lebih memilih PTN dibandingkan perguruan tinggi swasta adalah karena lulusan PTN akan laku di pasar kerja atau kelak akan memperoleh pekerjaan yang bagus;
- (c) Pengukuran skala sikap siswa tentang semangat untuk meraih pendidikan, diperoleh hasil bahwa pada umumnya responden memiliki sikap positif pada aspirasinya untuk meraih pendidikan yang lebih tinggi di masa yang akan datang. Ketika berbagai indikator dari variabel ini digabung dan kemudian diskor, maka diperoleh hasil, bahwa mayoritas siswa memiliki tingkat aspirasi yang tinggi pada pendidikan, utamanya pendidikan di jenjang perguruan tinggi (82,3%). Tingginya tingkat aspirasi siswa pada pendidikan, selain karena sebagian besar dari mereka memiliki semangat yang positif untuk dapat meraih pendidikan tinggi, juga karena harapan mereka terhadap suatu lembaga pendidikan tinggi itu, adalah agar dapat memperoleh pendidikan yang bermutu serta dapat menguasai keahlian atau pengetahuan tertentu yang diminatinya. Alasan lain yang juga mendukung tingginya tingkat aspirasi siswa pada pendidikan tinggi adalah karena adanya keinginan yang kuat untuk

mendapatkan pekerjaan "bergengsi", yaitu pekerjaan di sektor formal yang menjanjikan kedudukan atau posisi di tingkat manajerial ke atas.

3. Aspirasi siswa pada pekerjaan (AKS) menunjukkan bahwa:

- (a) Jenis-jenis pekerjaan yang diharapkan pada umumnya adalah bekerja di bidang jasa keuangan atau perbankan (28%); menjadi dokter, psikolog atau usaha-usaha yang bersifat sosial kemasyarakatan dengan mengandalkan keahlian yang dimiliki (13,5%) dan bekerja di bidang industri (13%);
- (b) Badan usaha atau lembaga dari pekerjaan yang diinginkan responden, antara lain: di perusahaan PMA (26,5%); perusahaan PMDN (21,7%) dan BUMN (19%), sedangkan yang ingin bekerja sebagai wiraswasta hanya sekitar 13%;
- (c) Posisi pekerjaan yang diharapkan responden setelah lulus sekolah adalah pada posisi manajerial ke atas (40,6%), namun ada pula yang hanya berharap bekerja pada posisi supervisor ke bawah (21,7%).

Berdasarkan jawaban-jawaban di atas, dapat disimpulkan, bahwa siswa SMU pada umumnya memiliki gambaran yang cukup ideal tentang suatu pekerjaan. Artinya, mereka beranggapan, bahwa pekerjaan-pekerjaan yang dianggap "menjanjikan" adalah jenis-jenis pekerjaan yang berkantor bersih dengan gedung megah (seperti bekerja di bank atau di perusahaan-perusahaan besar, baik BUMN maupun PMA), serta dapat menduduki posisi atau jabatan di tingkat manajerial (seperti menjadi asisten manajer, manajer sampai direktur). Sedangkan mereka yang ingin berwiraswasta setelah lulus sekolah, jumlahnya relatif kecil. Fenomena ini menunjukkan apa yang menjadi "impian" sebagian besar

siswa SMU tentang suatu pekerjaan nampaknya tidak sesuai dengan kenyataan yang ada, karena angka pengangguran terdidik di tingkat pendidikan tinggi jumlahnya relatif cukup besar. Ini artinya, jika para lulusan dari perguruan tinggi tidak siap untuk menciptakan lapangan pekerjaan sendiri, sebaliknya apabila mereka hanya mengandalkan pekerjaan dari orang lain atau perusahaan-perusahaan, maka masalah pengangguran terdidik, makin lama akan semakin membebani sistem perekonomian nasional. Belum lagi jika dihadapkan pada masalah-masalah sosial yang akan muncul, apabila para lulusan terlalu lama menjadi pengangguran.

4. Aspirasi orangtua pada pendidikan untuk anaknya setelah lulus SMU (APO), meliputi:
 - (a) Kesanggupan orangtua untuk membiayai pendidikan anak-anaknya hingga jenjang strata satu jumlahnya relatif besar, yaitu sekitar 56%;
 - (b) Dorongan orangtua agar anaknya dapat melanjutkan pendidikan ke jenjang strata satu, jumlahnya juga cukup besar, yaitu 69%;
 - (c) Harapan orangtua apabila anaknya memilih program studi tertentu, pada umumnya menganggap program studi yang akan dipilih anaknya itu memiliki prospek kerja yang bagus atau akan laku di pasar kerja (34%) dan sebanyak 22% orangtua responden menganggap program studi kelak akan memberikan pelatihan atau keterampilan tertentu yang berguna untuk anaknya, dan
 - (d) umumnya sikap orangtua cukup positif dalam upaya untuk menyekolahkan atau membekali pendidikan formal setinggi-tingginya bagi anak-anaknya. Apa yang menjadi harapan orangtua tentang masa depan pen-

dikan untuk anaknya, nampaknya juga bersesuaian dengan apa yang diharapkan para siswa tentang pendidikan yang akan ditempuhnya setelah SMU.

Ini artinya, bahwa pada umumnya orangtua cenderung memberikan dorongan yang kuat kepada anaknya, agar kelak si anak dapat mencapai tingkat pendidikan yang setinggi-tingginya. Hal ini berimplikasi pada harapan orangtua agar anaknya dapat memperoleh penghasilan yang layak dari pendidikan yang ditempuhnya. Ini berarti juga, orangtua melakukan hitungan "secara ekonomis" dan menganggap, bahwa dengan menyekolahkan anak maka hal itu merupakan bagian dari investasi jangka panjang.

Berdasarkan perhitungan tersebut, orangtua beranggapan, bahwa apabila mereka telah cukup banyak mengeluarkan "modal" atau berinvestasi dengan menyekolahkan anak-anaknya, maka suatu saat mereka akan memetik hasilnya melalui pekerjaan dan penghasilan yang akan diterima anaknya, setelah mereka lulus sekolah. Aspirasi siswa dan orangtuanya tentang pendidikan ternyata sesuai dengan teori fungsi-teknis pendidikan.

Pendekatan ini menganggap, bahwa anggota-anggota masyarakat akan memperoleh keahlian atau keterampilan tertentu apabila mereka bersekolah. Sekolah atau lembaga pendidikan formal akan memberikan pelatihan, baik dalam bentuk khusus atau berupa kemampuan umum. Aspirasi siswa dan orangtuanya tentang pendidikan yang diukur juga melalui skala sikap menunjukkan dukungan yang positif terhadap

upaya untuk melakukan perencanaan masa depan pendidikan yang lebih baik. Artinya, dengan memiliki rencana untuk meraih pendidikan hingga ke jenjang tertinggi, maka "keajaiban" yang berupa peningkatan penghasilan dan status sosial akan dengan mudah didapat. Orangtua berusaha mendorong anak-anaknya agar dapat melanjutkan pendidikan formal setinggi-tingginya, sehingga mereka diharapkan tidak akan mengulangi nasib seperti orangtuanya pada masa lalu. Nilai-nilai atau sikap semacam itu cenderung mendukung salah satu fungsi pendidikan, yaitu sebagai sarana untuk menaiki tangga mobilitas sosial dan sekolah pada akhirnya dianggap dapat mengubah nasib seseorang.

5. Aspirasi orangtua pada pekerjaan untuk anaknya (AKO), menunjukkan:
 - (a) Jenis-jenis pekerjaan yang dianggap sesuai oleh orangtua untuk anaknya, banyak dipilih antara lain adalah di bidang jasa keuangan dan perbankan (22%), industri (7,8%) dan jasa sosial kemasyarakatan sebesar 9%. Namun demikian, sebagian besar orangtua cenderung membebaskan atau menyerahkan pilihan pekerjaan kelak pada anak-anaknya (29%);
 - (b) Status badan usaha dari pekerjaan yang diharapkan orangtua untuk anaknya, antara lain adalah: BUMN (15%), PMA dan PMDN (masing-masing sebesar 12%) dan ternyata sebagian besar orangtua responden tidak menentukan pilihan atau menyerahkan pilihan pada anaknya (33%);
 - (c) Posisi pekerjaan yang diharapkan orangtua pada anaknya kelak ketika anaknya akan masuk dunia kerja antara lain adalah: ingin agar

anaknya bisa menduduki posisi manajerial ke atas (24%) dan sebesar 13% tidak terlalu tinggi harapannya, yaitu dapat bekerja pada posisi supervisor ke bawah, sudah dianggap baik. %tase terbesar untuk jawaban pada item pertanyaan ini adalah bahwa orangtua tidak menentukan pilihan, atau menyerahkan pilihan itu pada anak (61%).

Berdasarkan temuan data tersebut dapat dikatakan, bahwa meskipun ada sebagian orangtua yang memiliki gambaran ideal tentang pekerjaan untuk anak-anaknya, tetapi sebagian besar lagi merasa, bahwa memikirkan jenis pekerjaan atau posisi pekerjaan apa yang sesuai untuk anaknya, adalah suatu hal yang abstrak dan sulit untuk diramalkan. Terbukti, sebagian besar dari orangtua siswa, menyerahkan pilihan pekerjaan sepenuhnya pada anak. Ini berarti juga, bahwa memikirkan karir dan pekerjaan untuk anak, tidak berhubungan, saling terpisah dan bukan rangkaian dari jenjang dan jenis pendidikan yang telah dan akan ditempuh si anak.

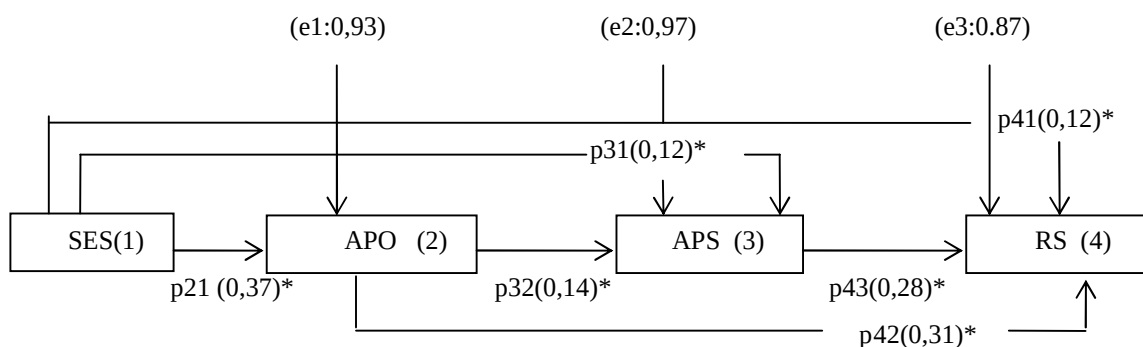
6. Status sosial-ekonomi orangtua (SES) pada umumnya berada pada lapisan menengah (42%) dan bawah (49%). Berdasarkan tingkat SES orangtua siswa tersebut, dapat diketahui, bahwa siswa yang berencana untuk melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi, tidak didominasi oleh siswa yang berstatus sosial-ekonomi atas saja, tetapi juga dari lapisan sosial-ekonomi yang lain. Fenomena tentang hubungan antara status sosial-ekonomi orangtua dengan rencana siswa untuk melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi menunjukkan, bahwa para responden beserta orangtuanya, tidak memandang tinggi-rendahnya SES orangtua, telah memahami pentingnya bersekolah hingga ke

jenjang pendidikan tertinggi. Bersekolah hingga ke perguruan tinggi atau mencapai gelar dari jenjang pendidikan formal, menurut anggapan mereka, adalah sesuatu yang universal dan diterima sebagai bagian dari budaya keluarga-keluarga di Indonesia, khususnya pada keluarga-keluarga di kota besar. Fenomena tersebut mendukung asumsi pendekatan fungsi-teknis pendidikan, di mana menurut pendekatan ini, orientasi seseorang dalam memperoleh pendidikan adalah atas dasar kompetisi dan prestasi. Artinya, pendidikan formal dapat dinikmati oleh siapa saja tanpa memandang status sosial-ekonomi dan asal-usul etnis orang.

7. Berdasarkan uji korelasi **product moment** diperoleh hasil hubungan-hubungan di antara beberapa variabel utama penelitian (SES, APS, APO, dan RS) ternyata signifikan dan bersifat linier positif, kecuali variabel aspirasi siswa pada pekerjaan (AKS) dan aspirasi

orangtua pada pekerjaan untuk anaknya (AKO) tidak berhubungan secara signifikan dengan variabel rencana siswa untuk melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi (RS). Berdasarkan uji analisis jalur (**path analysis**) nampak, bahwa model analisis kedua yang nampaknya paling sesuai untuk menjelaskan fenomena mengenai tingginya minat siswa SMU untuk melanjutkan sekolah ke jenjang perguruan tinggi. Dengan melihat model tersebut, dapat diketahui, bahwa status sosial ekonomi orangtua (SES) berhubungan langsung dan tak langsung dengan: (1) aspirasi orangtua terhadap pendidikan untuk anaknya (APO); (2) aspirasi siswa terhadap pendidikan untuk dirinya (APS) dan (3) rencana siswa untuk melanjutkan pendidikan jenjang perguruan tinggi (RS). Secara serentak pula, variabel SES, APO dan APS berpengaruh positif terhadap variabel rencana siswa SMU untuk melanjutkan pendidikan.

Model Empiris II



Tanda *: adalah nilai koefisien jalur yang signifikan.

Berdasarkan hasil uji statistik, baik korelasi *pearson* maupun dengan menggunakan *path analysis* diperoleh informasi, bahwa aspirasi orangtua dan siswa pada pekerjaan cenderung kurang mempengaruhi rencana

siswa untuk melanjutkan pendidikan formal ke perguruan tinggi. Berdasarkan temuan data tersebut dapat disimpulkan, bahwa rencana siswa untuk melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi memang tidak secara

langsung ditujukan untuk memperoleh pekerjaan. Responden dalam penelitian ini cenderung berfikir linear, artinya apabila telah lulus SMU maka kelanjutannya adalah masuk ke perguruan tinggi dan kemudian menjadi sarjana. Mengenai pekerjaan apa yang akan dihadapi setelah lulus dari perguruan tinggi, itu adalah persoalan nanti. Berdasarkan aspirasi pendidikan yang semacam itu, maka bersekolah di perguruan tinggi lebih dianggap sebagai simbol status agar dianggap "berwawasan", "berpendidikan lebih" atau "berbudaya". Mengenai pekerjaan apa yang akan diperoleh nantinya baru dipikirkan setelah lulus dari perguruan tinggi.

Penutup

Melalui hasil penelitian ini, dapat dilakukan kritik terhadap pendekatan fungsi-teknis pendidikan, yaitu pendekatan ini terlalu menyederhanakan persoalan tentang terdapatnya lapangan pekerjaan bagi anggota-anggota masyarakat. Logika pemikiran fungsi-teknis adalah, bahwa lapangan pekerjaan sudah disediakan oleh lembaga perekonomian dan masyarakat tinggal mengisinya sesuai dengan keahlian yang mereka miliki.

Sebaliknya, fenomena yang terjadi dalam kehidupan masyarakat menunjukkan, bahwa masyarakat cenderung tidak peduli dengan kesempatan yang tersedia. Karena menurut anggapan mereka, lapangan pekerjaan akan selalu ada dan semakin membutuhkan tenaga kerja dengan tingkat pendidikan yang semakin tinggi.

Berdasarkan pemikiran ini, masyarakat beranggapan, bahwa yang terpenting adalah bersekolah dulu, baru setelah itu mencari atau menunggu pekerjaan yang sesuai dengan bekal pendidikan yang mereka miliki. Berdasarkan pemikiran itu

juga, pada akhirnya lapangan pekerjaan diciptakan bukan untuk kepentingan lembaga perekonomian, tetapi diadakan untuk menampung anggota-anggota masyarakat yang terlanjur menyelesaikan pendidikannya.

Tidak jadi soal apabila pemerintah mampu menciptakan lapangan kerja baru yang dapat menampung banyaknya lulusan perguruan tinggi. Tetapi akan menjadi masalah serius apabila pemerintah tidak mampu menyediakan lapangan pekerjaan sesuai dengan besarnya jumlah penduduk yang telah menyelesaikan pendidikan formal, terutama pada jenjang menengah dan tinggi.

Daftar Pustaka

- Basri, Faisal, Didik J. Rachbini dan M. Nawir Messi, "Pengangguran Terbuka dan 'Mismatch' Pendidikan Tinggi," *Kompas*, 4 Maret 1997.
- Halsey, A.H., Jean Floud dan C. Arnold Anderson (ed), *Education, Economy and Society* (New York: The Free Press, 1969).
- Kantor Statistik DKI Jakarta, *Statistik Pendidikan Menurut Survei Sosial-Ekonomi 1992* (Jakarta: Biro Pusat Statistik, 1994).
- Karabel, Jerome dan A.H. Halsey (eds.), *Power and Ideology in Education* (New York: Oxford University Press, 1978).
- Notodihardjo, Hardjono, "Pendidikan Tinggi dalam Bidang Industri: Pandangan dan Harapan Mahasiswa, Lulusan dan Pengguna Lulusan Perguruan Tinggi di Jawa," Desertasi, Fakultas

Pasca Sarjana, Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan , Jakarta, 1981.

Pusat Penelitian Kompas, "Rencana Siswa Setamat SMU," *Laporan Survei Pendidikan*, Jakarta, 1997.

Pusat Komputer UI, *Data Peringkat SMTA Berdasarkan Rataan N>9, UMPTN, Jurusan IPA* (Jakarta: Pusat Komputer Universitas Indonesia, 1995).

Sujatmiko, Iwan Gardono, "Stratifikasi dan Mobilitas Sosial: Suatu Studi Awal Masyarakat Jakarta," *Jurnal Sosiologi Indonesia*, No 1, 1996.

Suryadi, Ace dan Agus Salim, "Kesenjangan Struktur Persediaan dan Pemerataan Tenaga Kerja Terdidik," *Prisma*, No 8, LP3ES, 1995.

Supriadi, Dedi, *Isu dan Agenda Pendidikan Tinggi di Indonesia* (Jakarta: Rosda Jayaputra, 1997).

Tilaar, H.A.R, *50 Tahun Kemerdekaan Indonesia: Analisis Kebijakan Pendidikan Indonesia* (Jakarta: Grasindo, 1995).